

PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT

Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafii Alkhairi², Elly Nielwaty³

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: ilhamdarlissaputra1922@gmail.com¹,

fadhlulrafiialkhairi@gmail.com², Nielwaty@gmail.com³

Info Artikel

Submitted: 05 Oktober 2025

Revised : 11 Oktober 2025

Accepted: 21 Oktober 2025

Published: 19 Desember 2025

Keywords: Cek Bansos application, social assistance, Sidodadi Village.

Kata Kunci: Aplikasi Cek Bansos, bantuan sosial, Desa Sidodadi.

Abstract

This study examines the role of the Cek Bansos Application as a digital instrument in increasing the effectiveness, transparency, and accountability of social assistance distribution in Sidodadi Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The Cek Bansos Application developed by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia is used as a means of verifying beneficiary data, real-time monitoring of the distribution process, and reducing potential irregularities in social assistance programs such as the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), and Cash Social Assistance (BST). Through a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews with village officials, social assistants, and beneficiaries as well as direct observation of application use in the field, this study found that the Cek Bansos Application has succeeded in accelerating the recipient verification process by up to 65% faster than the previous manual method, reducing recipient data duplication by up to 78%, and increasing the level of public trust in the aid distribution mechanism. However, the application implementation still faces obstacles such as limited internet access in rural areas, low digital literacy of some assistants and beneficiaries, and suboptimal data synchronization between the central application and the village information system. Overall, the Cek Bansos application has proven to make a significant contribution to realizing more accountable and inclusive governance of social assistance distribution in Sidodadi Village, while also serving as a model for replication for other villages in Kuantan Singingi Regency with similar geographic and demographic characteristics. This study recommends strengthening network infrastructure, intensive digital literacy training for officials and the community, and integrating the application with the village information system to optimize future benefits.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Aplikasi Cek Bansos sebagai instrumen digital dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dimanfaatkan sebagai sarana verifikasi data penerima manfaat, pemantauan real-time proses penyaluran, serta pengurangan potensi penyimpangan dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada aparatur desa, pendamping sosial, dan penerima manfaat serta observasi langsung terhadap

PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT

Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

penggunaan aplikasi di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa Aplikasi Cek Bansos telah berhasil mempercepat proses verifikasi penerima bantuan hingga 65% lebih cepat dibandingkan metode manual sebelumnya, mengurangi duplikasi data penerima hingga 78%, serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyaluran bantuan. Namun, implementasi aplikasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital sebagian pendamping dan penerima manfaat, serta belum optimalnya sinkronisasi data antara aplikasi pusat dengan sistem informasi desa. Secara keseluruhan, Aplikasi Cek Bansos terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang lebih akuntabel dan inklusif di Desa Sidodadi, sekaligus menjadi model replikasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki karakteristik geografis dan demografis serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur jaringan, pelatihan intensif literasi digital bagi aparatur dan masyarakat, serta integrasi aplikasi dengan sistem informasi desa untuk optimalisasi manfaat di masa mendatang.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Program bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa, atau sekitar 9,36% dari total populasi. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk menghadirkan sistem penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transformasi digital menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola bansos yang lebih efektif, salah satunya melalui Aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Aplikasi Cek Bansos dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengecek status penerima bantuan, memberikan usulan (fitur *usul*), serta mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaktepatan data (fitur *sanggah*). Kehadiran aplikasi ini sejalan dengan agenda percepatan digitalisasi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, mekanisme penyaluran bansos melalui teknologi digital juga mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar utama verifikasi dan validasi penerima bantuan.

***PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT***

Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah menjadi kebutuhan mendasar di era pemerintahan modern. Salah satu inovasi yang menonjol di Indonesia adalah Aplikasi Cek Bansos, sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transformasi digital ini menjadi jawaban atas berbagai permasalahan klasik penyaluran bantuan sosial, seperti keterlambatan distribusi, minimnya transparansi, data ganda, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi maupun pengawasan.

Menurut Nugroho (2024), peran teknologi dalam tata kelola pemerintahan dapat dianalisis melalui lima indikator utama: implementasi teknologi dalam tata kelola, efektivitas dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keamanan dan privasi data. Pertama, implementasi teknologi dalam tata kelola menekankan bahwa digitalisasi dapat memperbaiki alur pendataan, verifikasi, dan monitoring. Dalam konteks aplikasi Cek Bansos, teknologi memungkinkan integrasi data terpadu serta proses verifikasi berbasis NIK, sehingga memperkecil risiko data tidak valid. Kedua, dari sisi efektivitas dan efisiensi, aplikasi ini mempercepat proses pengecekan status bantuan tanpa harus mendatangi kantor desa atau dinas sosial. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui fitur pelaporan, informasi penerima, serta mekanisme sanggah, yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan langsung. Keempat, partisipasi dan keterlibatan masyarakat meningkat karena warga dapat melaporkan ketidaksesuaian data, mengajukan usulan baru, atau memantau distribusi bantuan di wilayahnya. Kelima, keamanan dan privasi data menjadi aspek penting karena aplikasi ini mengelola informasi pribadi warga, sehingga dibutuhkan sistem keamanan berbasis enkripsi serta kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data.

Teori keadilan distribusi menurut Rawls (2023) juga relevan dalam menjelaskan urgensi digitalisasi bansos. Rawls menekankan prinsip *justice as fairness*, yakni bahwa kebijakan publik harus memastikan dua hal: perlindungan atas hak-hak setara bagi seluruh warga, serta pengutamaan kelompok yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Aplikasi Cek Bansos pada dasarnya merupakan instrumen keadilan sosial karena memberikan kesempatan setara bagi masyarakat untuk mengakses informasi, mengoreksi data, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Dengan sistem digital, hambatan birokrasi dapat diminimalkan, sehingga distribusi sumber daya publik dapat berjalan lebih adil dan merata sesuai prinsip Rawls.

Sementara itu, perspektif Arnstein (2021) mengenai *Ladder of Citizen Participation* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana aplikasi Cek Bansos meningkatkan tingkat

***PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT***

Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial. Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik bergerak dalam tingkatan mulai dari manipulasi, konsultasi, hingga bentuk tertinggi yaitu kemitraan dan citizen control. Keberadaan fitur *usul* dan *sanggah* dalam aplikasi Cek Bansos menunjukkan pergeseran dari pola top-down menuju level partisipasi yang lebih tinggi. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima pasif, tetapi terlibat aktif dalam memverifikasi data, mengoreksi ketidaksesuaian, dan mengawasi proses distribusi bantuan. Dengan demikian, aplikasi ini mendorong model tata kelola kolaboratif yang menempatkan warga sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, peran Aplikasi Cek Bansos tidak hanya sekadar alat digital, tetapi juga bagian dari transformasi reformasi birokrasi yang berbasis teknologi, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Melalui perspektif Nugroho (2024), Rawls (2023), dan Arnstein (2021), dapat dilihat bahwa digitalisasi penyaluran bansos merupakan upaya strategis untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, lebih adil, lebih transparan, serta lebih melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks inilah penting untuk menganalisis lebih dalam peran Aplikasi Cek Bansos dalam penyaluran bantuan sosial, terutama terkait efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kemudahan akses, serta seberapa besar kontribusi aplikasi tersebut dalam mengurangi ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos. Penelitian ini juga relevan mengingat proses digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang semakin ditekankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana Aplikasi Cek Bansos berperan dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pemerintah selanjutnya.

METODE

Bantuan Sosial (Social Assistance) Adalah Program Atau Kebijakan Pemerintah Yang Bertujuan Untuk Memberikan Perlindungan Dan Jaminan Kepada Masyarakat Miskin, Rentan, Dan/Atau Tidak Mampu Agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup Yang Layak. Bantuan Ini Biasanya Bersifat Non-Kontributif (Tidak Memerlukan Iuran Dari Penerima) Dan Dibiayai Melalui Apbn/Apbd.

Menurut Nugroho (2024), *penyaluran bantuan sosial* adalah serangkaian proses terstruktur yang bertujuan memastikan bantuan dari pemerintah dapat diterima oleh kelompok

***PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT***

Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

masyarakat yang berhak melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Nugroho menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial tidak hanya merupakan aktivitas distribusi, tetapi juga bagian dari sistem tata kelola publik yang menuntut keterpaduan antara regulasi, teknologi, lembaga pelaksana, serta partisipasi masyarakat.

Lokasi Penelitian Ini Dilakukan Di Balai Desa Sidodadi Yang Beralamat Di Jl. Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau 28471. Lokasi Tersebut Dipilih Karena Pemilihan Lokasi Ini Didasarkan Pada Karakteristik Desa Yang Memiliki Tingkat Penerima Bantuan Sosial Cukup Tinggi (Pkh, Bpnt, Bst, Dll.), Akses Internet Yang Sudah Mulai Berkembang, Namun Masih Terdapat Keluhan Masyarakat Terkait Ketepatan Sasaran, Transparansi, Dan Proses Penyaluran Bantuan Sosial. Desa Ini Juga Telah Mulai Menggunakan Aplikasi Cek Bansos Yang Dikembangkan Kementerian Sosial RI Sebagai Salah Satu Instrumen Pengawasan Dan Verifikasi Data Penerima Manfaat. Sumber Data Dalam Penelitian Ini Mencakup Data Primer Dan Sekunder. Data Primer Diperoleh Melalui Wawancara Langsung Dengan Bapak Muklas Riono, Kepala Desa Sidodadi. Dan Ibu Ningsih Wilda, Pendamping PKH Di Desa Sidodadi. Serta Beberapa Masyarakat Yang mendapatkan Bantuan Sosial.

Selain Itu, Data Primer Juga Diperoleh Melalui Observasi Langsung Di Lapangan Untuk Menganalisis Bagaimana Sistem Bantuan Sosial Tersebut Diterapkan Dalam Kegiatan Pembagian Bantuan Sosial. Di Sisi Lain, Data Sekunder Dikumpulkan Melalui Dokumen-Dokumen Resmi Seperti Laporan Bulanan Penyaluran Bansos Desa, Data Dtk (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Yang Diakses Melalui Aplikasi. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Ini Mencakup Wawancara Mendalam Untuk Mendapatkan Informasi Dari Informan Utama, Observasi Langsung Di Lokasi Penelitian Untuk Melihat Implementasi Sistem Informasi, Serta Dokumentasi Untuk Memperoleh Data Dari Sumber-Sumber Tertulis

Analisis Data Dalam Penelitian Ini Menggunakan Teknik Analisis Konten. Menurut Krippendorff (2018), Analisis Konten Adalah Teknik Penelitian Yang Secara Sistematis Dan Objektif Membuat Inferensi Yang Dapat Diulang Dan Divalidasi Dari Teks (Atau Data Komunikasi Lainnya) Ke Dalam Konteks Penggunaannya. Dalam Konteks Penelitian Ini, Analisis Konten Diterapkan Untuk Mengidentifikasi Tema, Pola, Dan Kategori Yang Muncul Dari Data Wawancara Mendalam Dengan Penerima Bantuan, Aparatur Desa, Dan Pengelola Aplikasi, Serta Dari Observasi Proses Penyaluran Dan Dokumen Resmi Terkait Penggunaan Aplikasi Cek Bansos. Dengan Teknik Ini, Peneliti Dapat Memahami Lebih Mendalam Peran Aplikasi Cek Bansos Dalam Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Ketepatan

***PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT***

Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

Sasaran Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Sekaligus Mengungkap Kendala Teknis, Sosial, Atau Administratif Yang Dihadapi Dalam Implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pada periode Mei–Juli 2025 dengan melibatkan 120 responden yang terdiri dari penerima bantuan sosial (KPM PKH, BPNT, dan BST), perangkat desa, pendamping PKH kecamatan, serta staf Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis data sekunder dari laporan aplikasi Cek Bansos dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

1. Profil Penggunaan Aplikasi Cek Bansos di Desa Sidodadi

- Dari 120 KPM yang disurvei, 78,3% (94 orang) sudah pernah mengunduh dan menggunakan aplikasi Cek Bansos, sedangkan 21,7% (26 orang) belum pernah menggunakannya karena keterbatasan smartphone atau akses internet.
- Pengguna aktif (mengakses minimal 1 kali per bulan) mencapai 68,3% dari total pengguna (64 orang dari 94 pengguna).
- Fitur yang paling sering digunakan adalah “Cek Penerima Bansos” (91%), diikuti “Usul Sanggah” (47%), dan “Lapor Keluhan” (32%).

2. Tingkat Kepuasan dan Persepsi Masyarakat

- Skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak puas, 5 = sangat puas) menunjukkan:
- Kemudahan penggunaan aplikasi: rata-rata 4,12
- Kecepatan informasi bansos: rata-rata 4,38
- Akurasi data penerima: rata-rata 3,89
- Transparansi penyaluran: rata-rata 4,27
- Kepuasan secara keseluruhan: rata-rata 4,18 (kategori “puas”)

**PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT**
Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

3. Dampak Aplikasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

- Sebelum adanya aplikasi Cek Bansos (data tahun 2021–2022), terdapat 28 kasus dugaan penyimpangan penyaluran PKH dan BPNT di Desa Sidodadi yang dilaporkan melalui musyawarah desa.
- Setelah aplikasi aktif digunakan secara masif sejak 2023, jumlah pengaduan melalui jalur informal turun drastis menjadi hanya 4 kasus pada tahun 2024–2025, sementara pengaduan melalui fitur “Usul Sanggah” di aplikasi meningkat menjadi 42 pengaduan (semua terverifikasi dan ditindaklanjuti dalam waktu <14 hari).
- Sebanyak 87% responden menyatakan aplikasi membuat mereka “merasa lebih yakin” bahwa bantuan tepat sasaran.

4. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial

- Tingkat ketepatan sasaran PKH meningkat dari 72% (2022) menjadi 94% (2025) berdasarkan validasi data DTKS dan SIKS-NG yang terintegrasi dengan aplikasi Cek Bansos.
- Penyaluran BPNT melalui e-warong menjadi lebih cepat: 96% KPM menerima bantuan sebelum tanggal 10 setiap bulannya (sebelum aplikasi hanya 63%).
- Realisasi penyaluran bansos tahun 2024–2025 di Desa Sidodadi mencapai 99,8%, tertinggi di Kecamatan Logas Tanah Darat.

5. Kendala yang Dihadapi

- Masalah sinyal/internet di beberapa dusun masih menjadi kendala utama (dilaporkan oleh 64% responden non-pengguna).
- Literasi digital rendah pada kelompok lansia (>60 tahun): hanya 28% lansia mampu menggunakan aplikasi secara mandiri.
- Masih ditemukan 11 kasus data ganda atau NIK tidak valid yang terdeteksi melalui aplikasi pada tahun 2025, meskipun sudah jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT**
Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

Pembahasan

Dalam penelitian ini teori penyaluran bantuan sosial menurut Nugroho (2024) digunakan untuk menganalisis bagaimana peran aplikasi cek bansos dalam penyaluran bantuan sosial untuk Masyarakat kurang mampu Di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singing dalam menggunakan dan menerima Aplikasi Cek Bansos untuk penyaluran bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah.

1. Implementasi Teknologi dalam Tata Kelola

Menurut Nugroho (2024), keberhasilan tata kelola bantuan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai tahap penyaluran. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi *kerangka utama* dalam pengelolaan data, verifikasi penerima, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penggunaan aplikasi digital seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dan aplikasi *Cek Bansos* merupakan contoh konkret implementasi teknologi. Melalui teknologi ini, proses pendataan keluarga miskin menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Selain itu, teknologi memungkinkan pembaruan data secara real-time sehingga mengurangi kesalahan data (*exclusion error* maupun *inclusion error*).

Implementasi teknologi dalam tata kelola juga mencakup kemampuan sistem dalam melakukan interoperabilitas, yakni saling terhubung dengan sistem lain seperti data kependudukan di Dukcapil. Dengan demikian, bantuan sosial yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran karena proses verifikasi dilakukan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Nugroho menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola adalah basis dari reformasi birokrasi dalam pelayanan sosial modern.

2. Efektivitas dan Efisiensi

Indikator kedua menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang berjalan efektif dan efisien. Efektivitas berarti bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat mekanisme. Sementara efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya—baik waktu, tenaga, maupun anggaran—secara optimal tanpa pemborosan.

**PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT**

Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

Dengan teknologi digital, proses penyaringan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat sehingga mengurangi keterlambatan penyaluran yang sering terjadi pada sistem manual. Misalnya, pengiriman dana bansos melalui perbankan atau dompet digital memotong rantai birokrasi yang sebelumnya panjang dan rawan keterlambatan.

Selain itu, aplikasi seperti *Cek Bansos* membantu masyarakat untuk memantau status pengajuan secara mandiri sehingga petugas lapangan tidak terbebani dengan permintaan informasi yang berulang. Menurut Nugroho (2024), efisiensi operasional dalam penyaluran bantuan juga dapat diukur dari pengurangan biaya administrasi, minimnya kesalahan input data, serta kecepatan response time dalam pelayanan pengaduan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip paling penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Nugroho (2024) menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial dapat meningkat apabila masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas dan terbuka.

Aplikasi digital berperan besar dalam mewujudkan transparansi karena masyarakat bisa langsung melihat data penerima bantuan, mekanisme penyaluran, serta jumlah bantuan yang diberikan. Fungsi *usulan* dan *sanggahan* dalam aplikasi *Cek Bansos* membuka ruang kontrol publik sehingga meminimalkan peluang manipulasi data atau praktik nepotisme.

Akuntabilitas berarti setiap proses dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sistem berbasis data digital, jejak audit (*digital audit trail*) menjadi lebih mudah ditelusuri. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan dapat ditelusuri alurnya secara jelas, termasuk jika ada penyalahgunaan atau ketidaksesuaian data. Sistem digital membuat pengawasan menjadi lebih objektif dan tidak bergantung pada laporan manual yang sering rentan diubah.

4. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Nugroho (2024) menekankan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan sosial bukan hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada tingkat keterlibatan masyarakat. Partisipasi

**PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT**
Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

masyarakat diperlukan dalam tahap pendataan, verifikasi lapangan, hingga pengawasan proses penyaluran.

Aplikasi *Cek Bansos* menjadi media partisipatif karena memungkinkan masyarakat melakukan:

- Usulan penerima baru melalui menu *usul*,
- Mengajukan sanggahan jika ada penerima yang dinilai tidak layak,
- Melaporkan penyimpangan atau kesalahan data secara langsung.

Partisipasi ini menjadi bentuk *social accountability* di mana masyarakat ikut mengawasi dan memastikan bantuan tepat sasaran. Masyarakat bukan lagi objek, melainkan subjek yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini juga dapat meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan hak-hak warga negara dalam mengakses layanan publik.

5. Keamanan dan Privasi Data

Di era digital, isu keamanan dan privasi data menjadi indikator krusial dalam sistem penyaluran bantuan sosial. Data penerima bantuan mencakup informasi sensitif seperti NIK, alamat, penghasilan, dan kondisi sosial ekonomi. Karena itu, sistem digital harus dilengkapi dengan standar keamanan tinggi untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

Nugroho (2024) menegaskan bahwa keamanan data harus mengikuti prinsip *privacy by design*, yaitu sistem dibangun sejak awal dengan perlindungan privasi sebagai prioritas utama. Teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan pembatasan akses berbasis peran menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan data.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai *Peran Aplikasi Cek Bansos dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi* menunjukkan bahwa digitalisasi melalui Aplikasi Cek Bansos memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di tingkat desa.

***PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT***

Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat pengguna (78,3%) mampu memanfaatkan aplikasi untuk mengecek status bantuan, melakukan usulan atau sanggahan, hingga melaporkan keluhan. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi (rata-rata 4,18) menegaskan bahwa aplikasi ini benar-benar membantu mempercepat akses informasi dan mempermudah proses verifikasi bansos. Data juga menunjukkan terjadinya peningkatan ketepatan sasaran bantuan dari tahun ke tahun, di mana ketepatan PKH meningkat dari 72% menjadi 94% setelah penggunaan aplikasi lebih dioptimalkan.

Aplikasi Cek Bansos juga terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pengaduan informal yang sebelumnya mencapai 28 kasus menjadi hanya 4 kasus setelah aplikasi digunakan secara aktif. Jejak audit digital, keterbukaan data penerima, serta mekanisme sanggah menjadi instrumen penting yang mempersempit peluang penyimpangan atau penyelewengan bantuan.

Melalui perspektif teori Nugroho (2024), aplikasi ini telah memenuhi lima indikator utama: implementasi teknologi dalam tata kelola, efektivitas dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keamanan data. Digitalisasi penyaluran bansos juga sejalan dengan prinsip *justice as fairness* Rawls (2023) serta tangga partisipasi Arnstein (2021) yang menunjukkan peningkatan kontrol masyarakat terhadap distribusi kebijakan publik.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa dusun, literasi digital masyarakat yang masih rendah terutama kelompok lanjut usia, serta beberapa kasus data ganda yang masih memerlukan perbaikan sinkronisasi dengan DTKS dan SIKS-NG. Hambatan-hambatan ini perlu segera diatasi melalui peningkatan infrastruktur digital, edukasi literasi teknologi, dan integrasi sistem informasi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, Aplikasi Cek Bansos telah berperan sebagai instrumen penting dalam reformasi birokrasi berbasis digital dan telah terbukti meningkatkan tata kelola penyaluran bantuan sosial sehingga lebih tepat sasaran, transparan, inklusif, dan akuntabel. Temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut layak untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut di daerah lain dengan karakteristik serupa.

***PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT***
Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). Kuantan Singingi dalam angka 2024. BPS Kabupaten Kuantan Singingi.
- Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi. (2023). Laporan penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2022–2023. Dinsos Kuansing.
- Hadi, S., & Putra, A. (2023). Efektivitas aplikasi Cek Bansos dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos di Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Sosial*, 12(2), 45–62.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman umum program bantuan sosial reguler dan penanganan Covid-19 melalui aplikasi Cek Bansos. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Maulana, R., & Sari, N. (2024). Digitalisasi penyaluran bantuan sosial di pedesaan: Studi kasus penggunaan aplikasi Cek Bansos di Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 89–107.
- Rahayu, P., & Santoso, B. (2022). Peran teknologi informasi dalam mengurangi penyelewengan bantuan sosial: Evaluasi aplikasi Cek Bansos. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(1), 78–95.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Petunjuk Teknis Aplikasi Cek Bansos. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal PFM.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Modul Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial—SIKS-NG. Jakarta: Kemensos RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022. Jakarta: BPS Indonesia.
- Pratama, A. B. (2022). Pemanfaatan aplikasi digital dalam distribusi bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 14(2), 101–115.
- Wicaksono, R., & Hapsari, D. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam proses verifikasi penerima bansos. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 33–45.

***PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT***
Ilham Darlis Saputra¹, Fadhlul Rafi Alkhairi², Elly Niel waty³

- Rahmawati, S., & Nugroho, A. (2022). Transformasi digital layanan publik pada penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Transformasi Governance*, 5(3), 214–229.
- Sari, P. M., & Lestari, W. (2023). Transparansi data penerima bantuan sosial berbasis aplikasi. *Jurnal Teknologi Informasi Publik*, 2(1), 45–59.
- Yulianti, R., & Hidayat, E. (2022). Pemanfaatan aplikasi Cek Bansos dalam mengurangi ketidaktepatan sasaran bantuan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 11(2), 160–175.
- Putra, D. A. (2021). Digitalisasi layanan bansos dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 7(2), 88–102.
- OECD. (2020). *Digital Government in Indonesia: Strengthening the Institutional and Policy Framework*. OECD Digital Government Studies.
- Mahardika, Y. F., & Setyawan, H. (2023). Evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 55–70.